



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

“Meningkatnya Perekonomian
Rakyat Berbasis Perikanan
Yang Berkelanjutan”



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG



LAKIN 2024
DINAS PERIKANAN

0719 21137



Jl. Dok Kelurahan Kota, 33411



disperik.kabbelitung@gmail.com





Kata Pengantar

Buku laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan tentang realisasi pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga pada periode Tahun 2024-2026. Selain itu laporan ini juga merupakan bentuk media pertanggungjawaban satuan kerja kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Belitung dan masyarakat pada umumnya serta dapat juga digunakan sebagai publikasi kinerja Dinas Perikanan dalam menggunakan dana APBD dan APBN. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam menunjang RPD periode 2024-2026 dari rangkaian pelaksanaan rencana kerja yang menunjang rencana strategis (Renstra) Dinas.

Pencapaian Kinerja suatu instansi dikatakan baik apabila memiliki kerangka kerja logis yang menunjukkan adanya keterkaitan kebijakan, program, dan kegiatan nasional dan daerah hingga kebijakan, program, dan kegiatan dalam rencana strategis instansi serta keterkaitan dengan rencana strategis instansi lainnya yang saling berhubungan. Pada akhirnya dibutuhkan suatu kerja yang sangat keras untuk mencapai suatu kesinambungan antar instansi sehingga membentuk pembangunan yang benar-benar pro terhadap rakyat dan terprogram dengan baik.

Saran dan kritik membangun guna perbaikan pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Belitung dan laporan ini sangat kami hargai

Tanjungpandan, Januari 2025

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Belitung**

Firdaus Zamri, S.Pi.
Pembina Utama Muda
NIP 19700714 199803 1 005



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
a. Tugas dan Fungsi	1
b. Struktur Organisasi	3
c. Aspek Strategis Organisasi	7
d. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
a. Target Kinerja Tahun 2024-2026	11
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
a. Capaian Kinerja Tahun 2024	15
b. Kinerja Lainnya Tahun 2024	54
c. Akuntabilitas keuangan	60
BAB IV PENUTUP	68
a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024	68
b. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025	69
Lampiran	70



Daftar Tabel

1. Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	8
2. Tabel Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung periode 2024-2026	11
3. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024	14
4. Tabel Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024	14
5. Tabel Ringkasan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2024	16
6. Tabel pencapaian Indikator Kinerja pada Rangkaian Renstra 2018-2023 dan Rangkaian Renstra 2024-2026 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	18
7. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan) 1	19
8. Tabel Realisasi Nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung Tahun 2024	20
9. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran) 1	23
10. Tabel Realisasi Nilai Tukar Nelayan Tahun 2024	24



11. Tabel Realisasi Nilai Tukar Nelayan Tahun 2024	29
12. Tabel Realisasi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan	34
13. Tabel Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	44
14. Tabel Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional /Realisasi Provinsi lainnya.	45
15. Tabel Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	46
16. Tabel Analisis Program dalam Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	47
17. Matrik SWOT Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan di Kab Belitung	50
18. Tabel Nilai IFAS	51
19. Tabel Nilai EFAS	52
20. Arah Kebijakan, Strategi dan usulan program Kabupaten Belitung 2025	53
21. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	58
22. Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 menurut jenis belanja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024	61
23. Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 menurut program/kegiatan/sub kegiatan	61



Daftar Gambar

1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	4
2. Grafik Target dan Realisasi Nilai indikator kinerja Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung	21
3. Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN)	24
4. Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi).	30
5. Diagram Matriks SWOT	52
6. Analisis Tren Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Belitung	56
7. Grafik Target dan Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	57
8. Grafik Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024	65



Daftar Lampiran

1. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
2. Perbandingan Realisasi Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
3. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Output Kegiatan (IOK)
4. Perbandingan Realisasi Indikator Output Kegiatan (IOK)
5. Jumlah Program Prioritas Yang Tercapai Sesuai Target Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024
6. Jumlah Kegiatan Prioritas Yang Tercapai Sesuai Target Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024
7. Jumlah Proyek Prioritas Strategis Yang Tercapai Sesuai Target Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024
8. Jumlah Proyek Strategis Nasional Yang Tercapai Sesuai Target Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024
9. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
10. Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024



Ringkasan Eksekutif.

Pelaksanaan program yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam revisi kedua renstra tahun 2024-2026 terdiri dari 5 program, 16 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Dalam penyelenggaraan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja pada tatanan perangkat daerah setidaknya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2024-2026. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran strategis dinas telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 yaitu 109,83, Nilai yang diatas 100 ini menunjukkan jumlah yang diterima nelayan melebihi pengeluaran yang artinya nelayan belitung ditaraf yang sejahtera. Untuk Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di kabupaten belitung yaitu 105,56 atau lebih besar 100, sehingga pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga, hal ini juga dapat menyatakan bahwa pembudidaya di belitung juga sejahtera.

Dalam Pelaksanaannya beberapa yang menjadi faktor pendukung diantaranya 1. Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dari produksi Tahun 2023 sebesar 42.220,3 ton menjadi 40.774,86 ton pada Tahun 2023. Walaupun menurun namun nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan laut di Tahun 2024 cenderung stabil seperti Tahun 2023 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata rata terkecuali pada triwulan ke empat; 2. Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang relative mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik dan membantu memperlancar proses administrasi ke nelayan untuk memperoleh BBM (solar) bersubsidi; 3. Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari pemkab Belitung berupa mesin kapal, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan; 4. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan; 5. Pembinaan dan penyuluhan



yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap; 6. Melaksanakan peningkatan produksi budidaya ikan air laut, terutama ikan kerapu, dengan cara menumbuhkan pembudidaya-pembudidaya baru mengingat potensi budidaya ikan kerapu yang sangat besar namun baru termanfaatkan dalam jumlah yang kecil; 7. Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); 8. Memperbanyak komoditas jenis budidaya yang akan di budidayakan oleh masyarakat. 9. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar. 10. Meningkatkan keterampilan pembudidaya setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan-pelatihan melalui sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

Sedangkan yang harus diminimalisir terhadap penghambat kegiatan diantaranya 1. kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik; 2. Kondisi sarana dan prasarana Perikanan tangkap di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki; 3. Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan; 4. Mayoritas nelayan di Kabupaten Belitung masuk dalam kategori nelayan Kecil; 5. Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam kelengkapan administrasi usaha penangkapan; 6. Penurunan produksi lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga perlu moderenisasi sarpras penangkapan; 7. Beberapa jenis ikan mengalami penurunan harga jual ikan; 8. Adanya perubahan/peralihan mata pencaharian masyarakat pembudidaya yang sifatnya masih musiman akibat adanya aktivitas penambangan timah yang semakin marak karena harga yang cenderung lebih menjanjikan; 9. Sulitnya mendapatkan pakan alternative serta Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan ikan.

Total pagu dana yang dilaksanakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.057.948.350,- Realisasi pencapaian kinerja penggunaan anggaran Tahun 2024 mengalami penurunan jumlah anggaran dan persentase realisasi pencapaian di banding Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 yang lalu realisasi keuangan sebesar 17.106.510.975 atau terserap 90,25% dari pagu dana sebesar Rp. 18.955.476.831,- dengan rincian realisasi belanja Operasi mencapai Rp. 16.306.829.975,- (90,26%) dan belanja modal mencapai Rp. 799.681.000,- (89,88 %). Sedangkan pada Tahun 2024 realisasi keuangan mengalami penurunan nilai realisasi anggaran menjadi sebesar 11.706.470.309,- atau terserap 89,65% dari pagu dana sebesar Rp. 13.057.948.350,- dengan rincian realisasi belanja Operasi



mencapai Rp. 11.633.890.309,- (89,63%) dan belanja modal mencapai Rp. 72.580.000,- (93,44 %).

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh pada tahun 2024 dengan segala faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada didalamnya, pada tahun-tahun selanjutnya Dinas Perikanan harus lebih selektif dan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai target pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Dan agar pelaksanaan Renstra baru nantinya dapat berjalan dengan baik, besar harapan kami agar dalam proses penganggaran kegiatan yang telah direncanakan dapat didukung oleh semua pihak termasuk keberpihakan pendanaan sehingga PPAS untuk APBD dapat ditingkatkan.

**Bab I****Pendahuluan**

Suatu negara dikatakan sinergis jika dikelola dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang diketahui selama ini pemerintahan daerah memiliki persyaratan untuk menyelenggarakan roda pemerintahannya dengan *good governance* dengan cara mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka itu, pemerintahan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada awalnya pertanggung jawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dimana sekarang telah disesuaikan menjadi Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan kinerja dalam pelaksanaannya sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu, akan tetapi juga mencakup masa kini dan bahkan masa mendatang.

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan perjanjian kinerja yang disusun secara sistematis dan telah disepakati. Sedangkan Perjanjian Kinerja itu sendiri merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian Laporan Kinerja yang dibuat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung kepada atasannya yang menjelaskan pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2024.

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Belitung mempunyai :

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan pembangunan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
2. Penyusunan perencanaan pembangunan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
3. Pelaksanaan pembangunan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung akan tetap fokus berorientasi kepada pemberdayaan kelembagaan dan seluruh stakeholders perikanan demi terwujudnya kepentingan nasional dan pembangunan berkelanjutan dan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian maka pembangunan kelautan dan perikanan akan lebih banyak dilaksanakan oleh segenap masyarakat yang didukung oleh dinas sebagai penyedia prasarana dan sarana yang bersifat non komersial dan bersifat pembinaan.

Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Belitung meliputi lingkup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan usaha dan perizinan perikanan, Pengembangan Sumberdaya Perikanan yang tetap fokus pada peningkatan produksi, pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta peningkatan ketertiban dan pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan guna mencapai sasaran-sasaran untuk beberapa tahun kedepan.

Sedangkan Kebijakan pembangunan perikanan yang diambil harus menekankan pada pendayagunaan sumber daya perikanan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (keadilan sosial), dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya secara seimbang.

Salahsatu hal penting yang sangat perlu diperhatikan adalah kelestarian sumber air baku, kolong, sungai dan air laut di kabupaten belitung sebagai tempat budidaya ikan dan perikanan tangkap pada umumnya. **Penggunaan Tata Ruang** yang baik dan bertanggungjawab akan memberikan manfaat dimasing-masing sektor tanpa harus bersinggungan diantara sektor masing-masing yang akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Air bersih baik kolong, sungai dan laut akan memberikan banyak sumber penghidupan bagi masyarakat. Terkait dengan Eksploitasi Tambang di perairan tepi pantai kabupaten belitung, pada dasarnya sangat tidak mendukung adanya kegiatan tersebut. Kerusakan di laut berbeda dengan di darat. Tercemarnya air laut disuatu lokasi oleh kegiatan tambang akan berdampak pula dilokasi yang lain jika itu terjadi sangatlah tidak bijaksana untuk mematikan mata-pencarian masyarakat terutama yang bergerak sebagai nelayan dan pembudidaya ikan yang



berimbas pada berhentinya kegiatan pengolahan ikan yang sudah beroperasi di kabupaten belitung. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dikembangkan secara terus menerus tanpa merusak kelestarian alam berbeda dengan eksploitasi pertambangan yang banyak dilaksanakan di kabupaten belitung. Dengan itu disarankan agar **pemberian izin** penggunaan lahan mangrove (Konversi lahan) dan Lahan Pantai ataupun kelestarian sumber air untuk kegiatan apapun baik pariwisata, Budidaya, ataupun Eksploitasi Tambang sebaiknya dikaji lebih mendalam dan tidak asal memberikan izin.

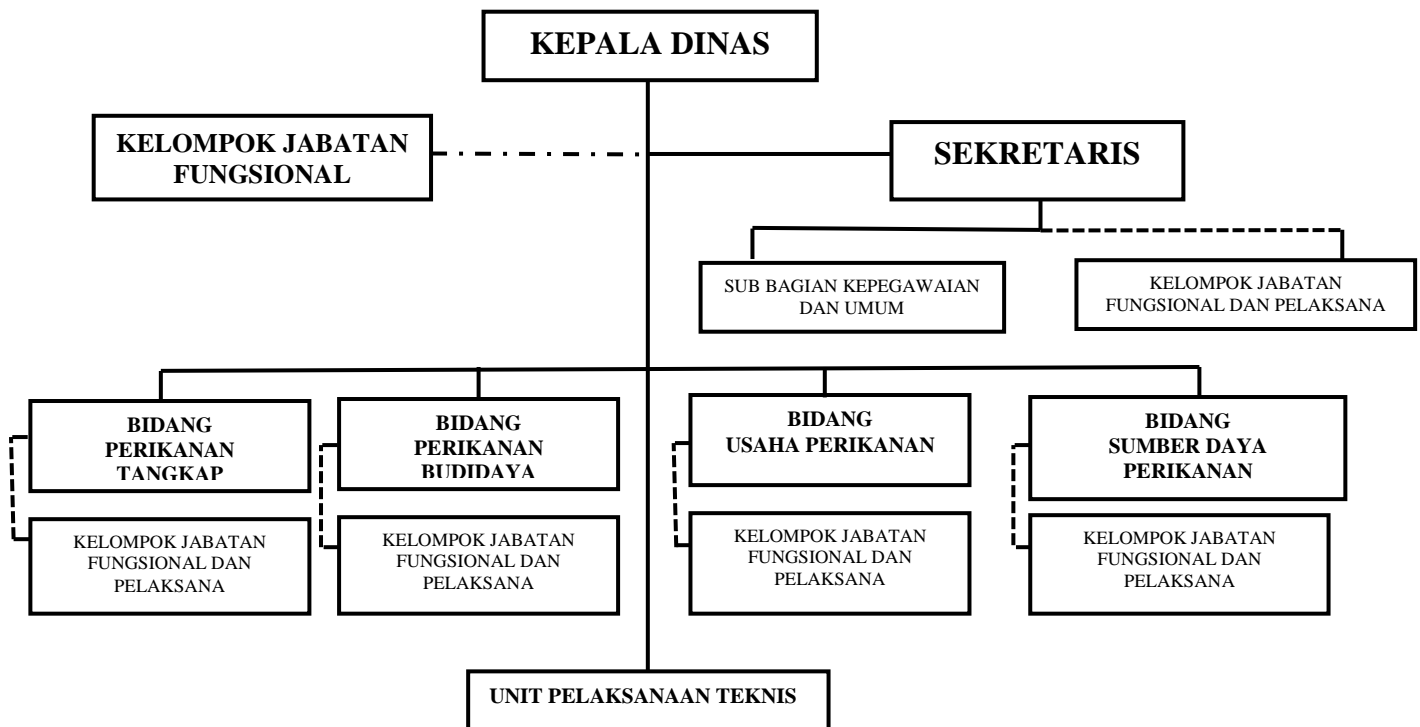
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dijelaskan bahwa Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perikanan terdiri dari satu bagian dan empat bidang teknis yang akan mengkoordinasikan sektor perikanan di kabupaten Belitung terdiri dari Sekretaris, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Tangkap serta Bidang Sumberdaya Perikanan dengan rincian struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 2.1.Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2.2.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - 3.1.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 4.1.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - 5.1.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
6. Bidang Sumber Daya Perikanan, terdiri dari :
 - 6.1.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
7. Unit Pelayanan Teknis.

Secara terinci Struktur Dinas Perikanan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas dapat dijelaskan garis intruksi kepemimpinan Sekretaris (Eselon 3) mempunyai 1 Kasubag dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sedangkan masing masing bidangs (Eselon 3) hanya mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta dinas juga memiliki Kepala UPT (Eselon 4) yang dibawahnya terdapat kasubag TU (Eselon 4b) langsung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan empat bidang teknis dan UPT yang akan mengkoordinasikan sektor perikanan di Kabupaten Belitung. Uraian tugas dan fungsi masing masing jabatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Perikanan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- perencanaan, pengumpulan bahan dan pengolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja, penganggaran dan pelaporan;
- perencanaan, pengumpulan bahan dan pengolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja, penganggaran dan pelaporan;



- c. perencanaan, pengumpulan bahan dan pengolahan data, koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perikanan;
- d. perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
- e. pengoordinasian, penatausahaan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pelaksanaan penyiapan penerbitan perizinan/rekomendasi usaha perikanan tangkap. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran terkait bidang tugasnya;
- b. Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kelembagaan dan sumber daya nelayan, penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan kecil;
- c. Penyiapan penerbitan perizinan/rekomendasi usaha perikanan tangkap;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan dan pelaksanaan penyiapan penerbitan perizinan/rekomendasi usaha pembudidayaan ikan. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kelembagaan dan sumber daya manusia perikanan budidaya, penyelenggaraan budidaya perikanan serta sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan;
- c. Penyiapan penerbitan perizinan/rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan dan bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, serta penyiapan



penerbitan perizinan/rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengolahan dan bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
- c. Penyiapan penerbitan perizinan/rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Perikanan

Bidang Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pengelolaan pembenihan, pengelolaan kesehatan ikan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelayanan Teknis.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Pembinaan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terdiri dari 1 UPT yaitu **UPT PERIKANAN BUDIDAYA** berdasarkan Peraturan Bupati Belitung No 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. Dalam pelaksanaan, UPT Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dibidang penerapan teknik pembenihan Budidaya air tawar, air laut dan air payau, serta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Perikanan Budidaya;
- b. Pengadaan dan pemeliharaan calon induk menjadi induk serta layanan pendistribusian calon induk;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan serta layanan pendistribusian telur dan atau benih;
- d. Penerapan teknik perbenihan ikan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;



- e. Pelaksanaan pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam rangka pembinaan perbenihan ikan air tawar, air laut dan air payau;
- g. Pelaksanaan kaji terap teknologi perikanan budidaya;
- h. Pelaksanaan fasilitasi SDM Perikanan budidaya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Perikanan Budidaya;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPT Perikanan Budidaya;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait bidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Pada beberapa tahun yang lalu pelayanan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung telah melaksanakan tugas dan fungsi dinas dengan cukup baik, pencapaian-pencapaian indikator kinerja telah memenuhi indikator yang ditargetkan sehingga pencapaian yang dilaksanakan memberikan banyak manfaat kepada laju pertumbuhan ekonomi masyarakat belitung khususnya pelaku sektor Perikanan. Kesejahteraan yang diharapkan dapat juga dilihat dengan meningkatnya laju pertumbuhan melalui peningkatan PDRB sektor Perikanan walaupun secara keseluruhan masih ditemukan perekonomian nelayan kecil yang masih perlu perhatian lebih lanjut.

Besarnya potensi yang dimiliki daerah menjadikan perikanan sebagai potensi andalan daerah, namun tanpa didukung oleh pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka potensi ini tidak akan memberikan pengaruh yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan besaran kontribusi potensi unggulan ini diupayakan melalui pembangunan urusan pilihan kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung memiliki faktor pendukung diantaranya :

- Sumber daya alam laut yang besar, secara umum dimana luas lautan kabupaten belitung yang besar dibanding luas daratan dengan demikian banyak potensi sumberdaya yang yang perlu dimanfaatkan dan di kaji lebih lanjut;
- Posisi geografis yang strategis kabupaten Belitung yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta berada pada jalur ALKI I.
- Kabupaten Belitung dijadikan sebagai wilayah Minapolitan Perikanan Tangkap;
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang bidang kelautan dan perikanan semakin tahun semakin meningkat melalui penerimaan pegawai baru.
- Dukungan kebijakan pembangunan bidang perikanan baik dari tingkat Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Potensi Wisata Bahari dan Kemaritiman yang besar dalam upaya mendukung sektor pariwisata daerah.



Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari urusan sektor perikanan mengandung permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi pendapatan sektor perikanan di Kabupaten Belitung.

Masalah ini timbul lebih disebabkan karena tingkat perekonomian pelaku sektor perikanan masih rendah khususnya nelayan kecil, pembudidaya ikan dan umkm sektor perikanan mikro terhadap sektor perekonomian secara umum di kabupaten Belitung. Walaupun diketahui beberapa tahun terakhir sektor perikanan memberikan kontribusi yang baik namun demikian dilapangan yang terjadi tidak berdampak nyata pada nelayan kecil dan pelaku perikanan mikro lainnya. Ekonomi yang baik ini lebih kepada pengusaha dan usaha menengah ke atas. Pemerataan ekonomi pada sektor perikanan perlu ditingkatkan sehingga nelayan kecil, pembudidaya ikan dan umkm sektor perikanan mikro dapat memperoleh pendapatan yang tinggi. Dengan pendapatan yang baik maka kesejahteraan pelaku sektor perikanan lebih baik lagi.

Berdasarkan identifikasi masalah pokok diatas maka dapat diidentifikasi lebih lanjut kedalam uraian masalah dan akar masalah yang sering dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dalam melaksanakan pembangunan sektor perikanan dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. (Disesuaikan dengan kondisi saat ini)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kontribusi pendapatan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	Masih Rendahnya Pendapatan pelaku sektor Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan database sektor perikanan; 2. Belum optimalnya Kualitas Sumberdaya Manusia pelaku sektor Perikanan Tangkap; 3. Belum Optimalnya Sarana prasarana perikanan tangkap; 4. Belum optimalnya Kelembagaan sektor Perikanan Tangkap; 5. Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan belum optimal; 6. Kurang Pedulinya Masyarakat terhadap kelestarian Sumberdaya Perikanan; 7. Belum Optimalnya Sarana prasarana Pengendalian Sumber Daya Perikanan. 8. Belum optimalnya pemasaran hasil produk sektor Perikanan; 9. Daya saing produk hasil perikanan belum optimal; 10. Belum Optimalnya Sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;



		Masih Rendahnya Pendapatan pelaku sektor Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal Kemampuan Pembudidaya untuk menambah sarana dan prasarana budidaya; 2. masih rendah Ketersediaan Benih Ikan baik kuantitas dan kualitas ; 3. Masih rendahnya kemampuan teknis Pembudidaya ikan; 4. Masih rendahnya diversifikasi Budidaya Perikanan; 5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya; 6. Belum optimalnya Kelembagaan sektor Perikanan Budidaya.
--	--	---	--

Dinas Perikanan merupakan satuan kerja yang bekerja sesuai tugas dan fungsi dengan baik dan bekerja maksimal pada sektor perikanan. Dari hasil analisa permasalahan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pelaku sektor Perikanan;
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sektor Perikanan yang berbasis teknologi dan Ramah Lingkungan;
3. Pengembangan basis data sumberdaya Perikanan di Kabupaten Belitung;
4. Penguatan usaha bagi pelaku usaha sektor perikanan;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan sektor Perikanan;
6. Peningkatan Konsumsi ikan oleh masyarakat;
7. Mengembangkan jaringan pemasaran sektor Perikanan;
8. Pemenuhan kebutuhan Benih Ikan yang berkualitas bagi Pembudidaya;
9. Pengembangan Proses Pembenihan Ikan Hias;
10. Meningkatkan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian Sumber Perikanan yang ramah lingkungan;
11. Pengendalian inflasi komoditas sektor perikanan;
12. Percepatan Proses Pemulihan Ekonomi sektor perikanan pada masa pandemic Covid-9;
13. Meningkatkan produksi dan kualitas produk olahan hasil perikanan.
14. Mendukung dan berperan serta dalam pengembangan Kampung nelayan maju, Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik;
15. Mempercepat proses pengembangan Pelabuhan Munsang, Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk.

Dari beberapa isu strategis tersebut diatas pada dasarnya yang menjadi muara permasalahannya adalah **Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap Tingkat pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan pelaku Sektor Perikanan yang meliputi nelayan, Pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya**



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

- a. Tugas dan Fungsi;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Aspek Strategis Organisasi;
- d. Sistematika Laporan;

BAB II. PERENCANAAN KINERJA,

- a. Target Kinerja Tahun 2024-2026;
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA,

- a. Capaian Kinerja Tahun 2024;
- b. Kinerja Lainnya Tahun 2024;
- c. Akuntabilitas keuangan;

BAB IV. PENUTUP,

- a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024;
- b. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025;

LAMPIRAN.


A. Target Kinerja Tahun 2024-2026

Berdasarkan Penjabaran RPJPD dan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026 dapat dihasilkan kesimpulan bahwa Tujuan Pembangunan Perikanan Kabupaten Belitung adalah:

1. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis perikanan yang berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan pencapaian sasaran yaitu (1). Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan.

Secara terinci indikator pencapaian sasaran pembangunan perikanan Kabupaten Belitung yang akan dicapai Tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. Tabel Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung periode 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis perikanan yang berkelanjutan		Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung (%)	22,10	22,15	22,20
		Keterangan : Rumusan: = Nilai PDRB sub sektor Perikanan Tahun-N / Nilai Total PDRB Kab. Belitung Tahun-N X 100 catatan: - Nilai PDRB sub sektor Perikanan Tahun-N dari perhitungan mandiri dinas perikanan dan; - Nilai Total PDRB Kab. Belitung Tahun-N dari BPS di Belitung dalam Angka			
	Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Rumusan: $NTN = IT/IB \times 100\%$ IT : Indek Harga yang diterima Nelayan IB : Indek Harga yang dibayar Nelayan catatan: Nilai NTN diperoleh dari perhitungan Pihak Ketiga yang kompeten melalui Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	114	115	116



		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105	106	107
		Rumusan: $NTPi = IT/IB \times 100\%$ IT : Indek Harga yang diterima Pembudidaya Ikan IB : Indek Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan catatan: Nilai NTPi diperoleh dari perhitungan Pihak Ketiga yang kompeten melalui Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS).			

Adapun penjelasan terkait indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1) Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung (%)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi PDRB subsektor Perikanan terhadap Total PDRD Kabupaten Belitung. Dimana Nilai kedua PDRB tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Belitung. Kemudian dihitung persentasenya berdasarkan rumusan:

Persentase Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung

$$= \frac{\text{Nilai PDRB sub sektor Perikanan Tahun-N}}{\text{Nilai Total PDRB Kab. Belitung Tahun-N}} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

2) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) atau pihak lain yang kompeten misalnya dari universitas

Nilai NTN Tahun 2024 diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:



$$NTN = IT/IB \times 100\%$$

IT : Indek Harga yang diterima Nelayan

IB : Indek Harga yang dibayar Nelayan

3) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas BPS atau pihak lain yang kompeten misalnya dari universitas.

Nilai NTPi Tahun 2024 diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

$$NTPi = IT/IB \times 100\%$$

IT : Indek Harga yang diterima Pembudidaya Ikan

IB : Indek Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 telah disusun Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam renstra PD dan merupakan turunan dari indikator dalam RPD Kabupaten Belitung. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini, sasaran, indikator kinerja dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam IKU PD tahun 2024-2026. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota satker pada capaian kinerja yang diinginkan. Penetapan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dimana kinerja tahun 2024 merupakan periode pertama dan merupakan periode awal untuk mencapai keberhasilan dari pencapaian kinerja pada RPD Kabupaten Belitung dalam kurung waktu tiga tahun.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimaksud memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta pagu anggaran. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.



Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih tepat. Perencanaan kinerja tahunan ini merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan kinerja tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja sasaran. Berikut dapat kita lihat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati berdasarkan Perubahan Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
INDIKATOR TUJUAN			
1	Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis perikanan yang berkelanjutan	1. Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung (%)	22,10
INDIKATOR SASARAN			
1	Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	114
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105

Secara lebih terukur dan terarah Rencana Kinerja yang dituangkan dalam program kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja untuk Tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Belitung, Berikut disampaikan dukungan APBD yang dianggarkan pada Anggaran Belanja Langsung pada Pelaksanaan Program Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. Tabel Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.261.584.300
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.740.968.750
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	660.831.100
4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	392.983.200
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.001.581.000
Jumlah		13.057.948.350



Sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Bab 3 yang memaparkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan mengacu pada nilai target indikator yang telah dijelaskan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, telah ditetapkan bahwa sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Belitung adalah :

1. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis perikanan yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan;

Sasaran tersebut di atas terkait erat dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. Selanjutnya dari sasaran di atas, telah dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan. Sebagai konsekuensinya, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung telah menjabarkan dalam rencana anggaran tahun 2024. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis dari berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka telah dilakukan evaluasi terhadap perjanjian kinerja seperti di bawah ini.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- | | | |
|---|------------------------|----------------------|
| - | 95 s.d. 100 | = Baik Sekali |
| - | 70 s.d. < 95 | = Baik |
| - | 55 s.d. < 70 | = Cukup |
| - | < 55 | = Kurang |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab



tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan realisasinya.

1. Ringkasan Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dengan menggunakan ukuran rata-rata pencapaian indikator kinerja dari pada setiap kegiatan, yang pada umumnya baru pada taraf input dan output (namun pada beberapa kegiatan telah mencapai indikator outcome) dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran, tujuan serta misi dinas yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung atas sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja, menunjukkan bahwa indikator kinerja Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab.Belitung (%) datanya belum tersedia karena PDRB Kabupaten Belitung oleh BPS belum di Rilis, indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan (96,34 %) sedikit lagi mencapai target dan indikator kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (100,53 %) telah mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis secara lengkap dapat dilihat pada tabel ringkasan kinerja berikut ini.

Tabel 5.

Tabel Ringkasan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIK ASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
INDIKATOR TUJUAN							
1	Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis perikanan yang berkelanjutan	1. Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab.Belitung (%)	%	22,10	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia
INDIKATOR SASARAN							
1. 1	Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	114	109,83	96,34	Belum Tercapai
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	-	105	105,56	100,53	Tercapai

Keterangan *: Nilai PDRB diambil dengan menggunakan indeks implisit PDRB sektor perikanan dari data laju pertumbuhan pertanian yang tersedia atas dasar harga berlaku.

Untuk melihat sampai sejauhmana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar hasil-hasil yang telah diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-



indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta dapat juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Beberapa hal yang dapat dijelaskan pada tabel diatas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adalah sasaran yang ditargetkan telah dicapai dengan baik untuk indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) belum tercapai dari target namun nilai realisasi tersebut kategori tetap tertinggi. Untuk indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sudah tercapai dari target yang ditetapkan Sedangkan untuk Indikator Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung yang merupakan indikator Tujuan (Outcome) belum dapat disajikan dikarenakan Data Belum Tersedia, Indikator tersebut merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan baru Dirilis oleh BPS pada bulan maret tahun 2025 sehingga data dimaksud belum dapat disimpulkan pencapaiannya. Dalam Pelaksanaannya Pencapaian sasaran secara utuh tidak hanya memerlukan upaya-upaya pencapaian lain yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya tersebut, tetapi juga upaya-upaya lain yang relevan yang dilakukan oleh instansi-instansi lain. Paling tidak ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk dapat diperhatikan lebih lanjut dalam pencapaian indikator diantaranya:

- Adanya keterbatasan dana/anggaran APBD Kabupaten Belitung. Alokasi PPAS yang disediakan belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada di renstra dan Renja 2024. Dengan demikian ada beberapa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran secara menyeluruh tidak dapat dicapai sesuai yang ditetapkan;
- Adanya keterbatasan dana/anggaran pada APBN dan APBD Provinsi sehingga banyak kegiatan yang diusulkan dari kabupaten dengan anggaran tersebut tidak dapat terpenuhi;
- Anggaran DAK Tahun 2024 tidak ada sehingga banyak paket pekerjaan yang tidak bisa terlaksana;
- dan Adanya keterbatasan sumber daya manusia SDM yang memenuhi persyaratan dalam memegang tugas dan jabatan pada pelaksanaan suatu sub kegiatan.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka ditempuh prioritas terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang telah diusulkan pada awal perencanaan. Atas dasar hal ini telah ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan yang dipandang menjadi prioritas bagi dinas sebagaimana telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Kegiatan unggulan pada umumnya merupakan kegiatan yang sesuai dengan renstra dan usulan hasil musrembang serta pokok pokok pikiran DPRD.

2. Uraian Kinerja

Selanjutnya sebelum kita membahas pada masing masing kinerja di tahun 2024 ada lebih baiknya kita mengetahui dahulu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada beberapa tahun pada periode renstra sebelumnya dengan melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun pada Rencana Strategis tahun 2018-2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut: